

BIMBINGAN TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI (SAQ) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NTT

HOTEL ASTON KUPANG, 11 APRIL 2023

MATERI BIMTEK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Republik Indonesia

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pusat Penerangan
Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
Selasa, 11 April 2023



sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024:
"mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing."

ARAHAN RPJPN 2005-2025

VISI PRESIDEN
"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeadilan Berdasarkan Gotong Royong"

KEGIATAN POKOK

1. Mengembangkan Sistem dan Mekanisme yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik

Halaman 1 / 14

diskominfo
NTT

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PPID PEMERINTAH PROVINSI NTT

Ir. Yandi Lasi, M.Si
Pj. Kadis KOMINFO Provinsi NTT
Kupang
11 April 2023



Dasar Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F: Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, berhak mencari, memperoleh dan berhak mendapatkan informasi publik
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008: Keterbukaan Informasi Publik
- PP 61 Tahun 2010: Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017: Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- PerGub NTT No. 30 Tahun 2021: Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi NTT
- KepGub NTT No. 122/KEP/HK: Dokumentasi Pemerintah Provinsi NTT

Halaman 1 / 20

STRATEGI PENINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH

Oleh: Ichsan Arman Pua Upa, S.KM



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

Mengapa KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK dibutuhkan?

Halaman 1 / 15

KOMISI INFORMASI
REPUBLIC OF INDONESIA

DATA RESPONDEN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK UMUM TAHUN 2023

Data Badan Publik

Nama Badan Publik : _____
Alamat Badan Publik : _____
No. Telp/Faks : _____
Website : _____

Data Responden

Nama Responden : _____
Jabatan : _____
No. Telp/HP : _____
E-mail : _____

Page 1 | 7

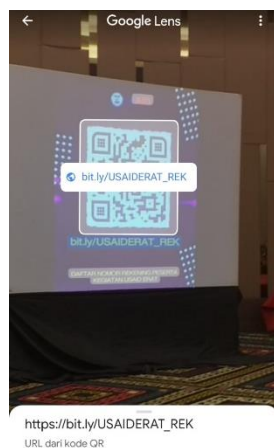
KOMISI INFORMASI
REPUBLIC OF INDONESIA

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2023

Data PPID /Pejabat di Bidang Informasi, Komunikasi atau Kehumasan

DOKUMENTASI KEGIATAN







SERTIFIKAT

Nomor : 890/247/Kominfo 13/2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT DAN USAID ERAT

Memberikan Sertifikat kepada

Paul J. Andjelicus

Yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Pedoman Umum & Panduan Pengisian SAQ
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTT Tahun 2023
Tanggal 11 April 2023

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ir. Yandri Lasi, M.Si
NIP. 19650819 199401 1 001

Bimbingan Teknis Pedoman Umum & Panduan Pengisian SAQ
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTT
Tahun 2023
Nomor : 890/247/Kominfo 1.3/2023

No.	Materi	Durasi Pembelajaran
1	Kebijakan & Strategi Nasional Dalam Meningkatkan Kinerja KIP	1 JP
2	Arah Kebijakan KIP Di Pemerintah Daerah	1,5 JP
3	Strategi Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Daerah	1 JP
4	pembahasan SAQ Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	1,5 JP
Total		5 JP

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ir. Yandri Lasi, M.Si
NIP. 19650819 199401 1 001